# BAB I

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Masalah

Istilah perbankan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umumnya dan tidak dapat dipungkiri lagi bagi yang sudah pernah menggunakan jasa perbankan tak lepas dari perbankan apalagi dalam hal pembayaran. Istilah perbankan berasal dari kata ‘bank’ yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.[[1]](#footnote-1)

PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero tbk adalah salah satu bank milik pemerintahan yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895. BRI memiliki Visi menjadi *The Most Valuable Banking Group* di Asia Tenggara dan *Champion of Financial Inclusion* dan Misi melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat dan praktik *good corporate governance* dan memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)[[2]](#footnote-2).

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Galih Andika[[3]](#footnote-3) salah satu pegawai BRI pada Divisi Retail Payment, menyebutkan bahwa BRI memiliki berbagai divisi yang memiliki berbagai macam peran tersendiri. Terutama Divisi Retail Payment yang merupakan salah satu divisi yang berada di bawah direksi konsumer yang berfokus pada pengelolaan jenis pembayaran ataupun transaksi tanpa menggunakan uang tunai atau yang biasa disebut dengan *Cashless*.

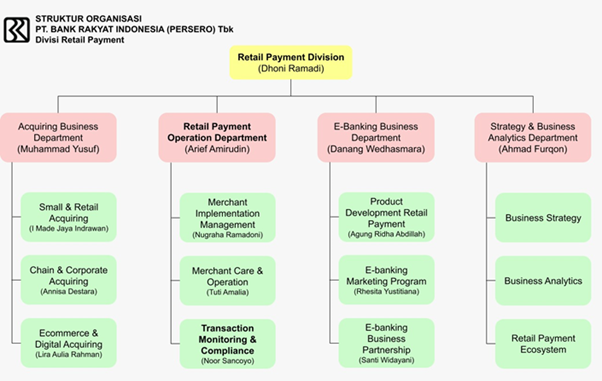
Masyarakat urban saat ini sedang beralih ke penggunaan layanan tanpa uang tunai dimana pembayaran seperti ini juga cocok di masa pandemi covid 19 yang semua sistem pembayarannya diprioritaskan ke non tunai demi menghindari kontak fisik. Transaksi non tunai pada Bank BRI menggunakan produk Brizzi, Mesin EDC, Qris dll. dengan adanya penggunaan transaksi tersebut maka diperlukan pengawasan, dan mitigasi risiko agar nasabah mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan produk produk dari Bank BRI[[4]](#footnote-4).

Divisi Retail Payment memiliki pembagian untuk melaksanakan tugasnya yang pada setiap departemen memiliki peran dan kewenangan masing masing. Terdapat 4 (empat) pembagian departemen yaitu Acquiring Business Department, E-banking Business Departement, Retail Payment Operation Department dan Strategy & Business Analytics Department. Untuk peran dan wewenang terhadap mitigasi dan monitoring risiko terdapat pada departemen Retail Payment Operation Department[[5]](#footnote-5)*.*

Berikut Struktur Organisasi Divisi Retail Payment berdasarkan website [www.bristars.co.id](http://www.bristars.co.id) yang merupakan website pribadi perusahaan yang hanya bisa diakses lewat jaringan kantor.

**Gambar 1**

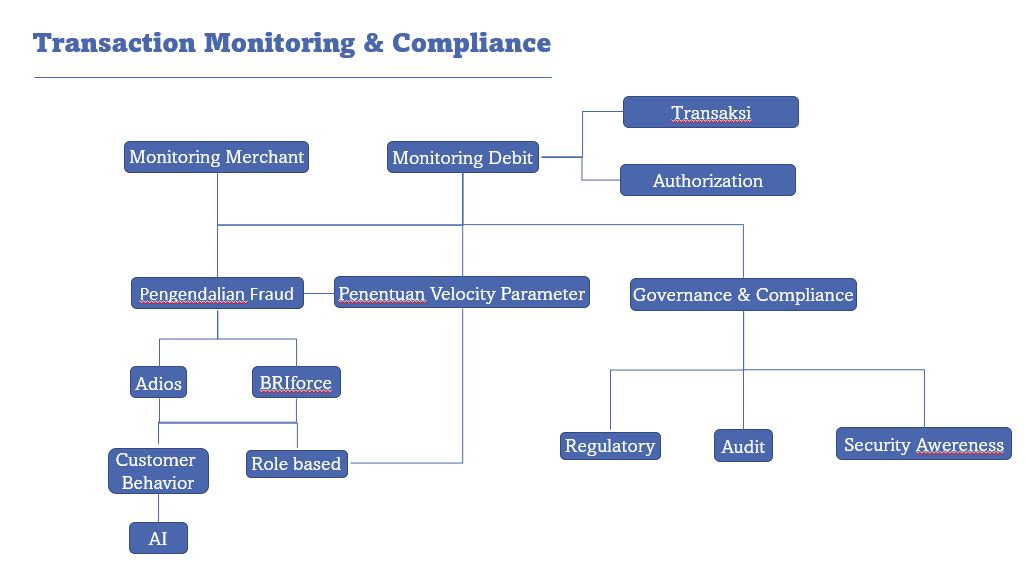
Struktur Organisasi Divisi *Retail Payment*



Sumber*: www.bristars.co.id. Diakses pada tanggal 24 November 2021*

**Gambar 2**

Bagan *Transaction Monitoring And Compliance*



Sumber*:* Wawancara *dengan Galih Andika tanggal 22 November 202 di Kantor BRI Jakarta Pusat.*

Dalam menjalankan segala macam produk, divisi *retail payment* mengacu terhadap fungsi kepatuhan yang mana fungsi kepatuhan tersebut antara lain terdiri dari sub fungsi *regulatory*, audit, dan *security awareness* yang dimana untuk fungsi *regulatory* berfungsi menjalankan regulasi regulasi yang diterbitkan oleh Regulator perbankan guna memenuhi fungsi kepatuhan dari beberapa regulator dalam negeri dan regulator luar negeri yakni antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Mastercard, Visa, dan juga *Japan Credit Bureau* (JCB)[[6]](#footnote-6).

Di dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah suatu badan hukum publik yang berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Untuk jenis peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, tercantum pada Pasal 1 angka 8 dan angka 9 tertera bahwa Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Gubernur (PDG).[[7]](#footnote-7)

Peraturan Bank Indonesia sendiri adalah suatu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan sifatnya mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara. Dengan demikian Peraturan Bank Indonesia mengikat semua orang/badan. Sedangkan untuk Peraturan Dewan Gubernur adalah suatu ketentuan hukum yang memuat aturan-aturan *intern*. Peraturan ini tidak berlaku terhadap setiap orang, hanya berlaku bagi internal Bank Indonesia.[[8]](#footnote-8)

Tercantum pula di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 sedikitnya terdapat 11 pasal yang secara tegas mengamanatkan agar masalah tertentu diatur oleh Peraturan Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia untuk mengeluarkan peraturan/penetapan (*power to regulate*) dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power to impose sanctions*).[[9]](#footnote-9)

Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran ‘nilai’ antar perorangan, Bank, dan lembaga lainnya baik domestik maupun *cross border* ‘antar negara’.[[10]](#footnote-10)

Sistem Pembayaran terlahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran (medium of change) atau intermediary dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, suatu sistem pembayaran terdapat 3 (tiga) tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan penyelesaian akhir (*settlement*).

Belakangan ini di indonesia sedang gencar dibahas perihal Reformasi pengaturan sistem pembayaran (SP) yang merupakan suatu bagian dari *blueprint* sistem pembayaran indonesia (BSPI) 2025 yang memiliki tujuan mencapai keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital di dalam menciptakan suatu sistem pembayaran yang cepat, murah, mudah, aman dan andal, dengan tetap mempertimbangkan kestabilan, perluasan akses, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan *best practices*.[[11]](#footnote-11)

Kebijakan untuk melakukan suatu reformasi pengaturan sistem pembayaran sudah diawali dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (PBI SP) yang perlu ditindaklanjuti antara lain dengan adanya penerbitan Peraturan Bank Indonesia tersebut tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI PJP) untuk memastikan suatu efektivitas implementasi Peraturan Bank Indonesia Sistem Pembayaran dan serta untuk mengakomodir suatu kebutuhan pengaturan berdasarkan perkembangan inovasi dan model bisnis dan penyesuaian ketentuan sistem pembayaran yang telah ada.[[12]](#footnote-12)

Suatu Penyedia Jasa Pembayaran dalam menjalankan aktivitas yang meliputi: penyediaan informasi sumber dana, *payment Initiation* dan/atau *acquiring services,* penatausahaan sumber dana; dan/atau layanan remitansi, dan aktivitas penunjang yang meliputi penyediaan teknologi untuk pemrosesan transaksi pembayaran; penyediaan layanan penunjang kegiatan penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya.[[13]](#footnote-13)

Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebetan rekening di bank dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut.[[14]](#footnote-14)

Jenis-jenis uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1A ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (*registered*).
2. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (*unregistered*).[[15]](#footnote-15)

Dalam penerapan reformasi sistem pembayaran dan penerapan fungsi kepatuhan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021. Tentang Penyedia Jasa Pembayaran Bank Rakyat Indonesia yang merupakan badan Penyelenggara Jasa Pembayaran yakni suatu lembaga yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa[[16]](#footnote-16) memiliki kewajiban untuk memenuhi fungsi kepatuhan yakni serangkaian tindakan preventif untuk memastikan bahwa suatu kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia[[17]](#footnote-17).

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk penyusunan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/6/PBI/2021 TENTANG PENYEDIA JASA PEMBAYARAN DI BANK BRI”

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor.23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran di Bank BRI?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Bank BRI dalam penerapan PBI Nomor.23/6/PBI/2021?

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor.23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran di Bank BRI.
2. Untuk mengkaji kendala penerapan peraturan Bank Indonesia nomor.23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran di Bank BRI.

## Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi dalam bidang ilmu Hukum ini, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, referensi, literatur maupun bahan informasi yang dapat digunakan bagi para peneliti kedepannya.

1. Manfaat Praktis
   1. Untuk memberikan bahan masukan berupa kajian yuridis yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk lebih menyempurnakan dalam penerapan peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021.
   2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

## Tinjauan Pustaka

1. Muhammad Mustain, Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (E-Money) Di Indonesia. Dalam penulisan hukum ini, penulis yang bersangkutan mengangkat tema PBI Nomor 11/12/PBI/2009, berbeda dengan tema yang penulis angkat yaitu PBI Nomor 23/6/PBI 2021 yang merupakan Regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia[[18]](#footnote-18).
2. Muhammad Tedy Dorisman Setiadi, Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/Pbi/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Kredit Pada Pusat Perbelanjaan Di Kota Bengkulu. Dalam penulisan hukum ini, penulis yang bersangkutan mengangkat tema yang berfokus kepada Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Mengguanakan Kartu Kredit yang mengacu kepada PBI Nomor. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, berbeda dengan tema yang penulis ambil yang berfokus pada Penyedia Jasa Pembayaran yang mengacu kepada aturan terbaru yaitu PBI Nomor. 23/6/PBI/2021[[19]](#footnote-19).
3. Triana Pratiwi, Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Perdagangan (Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik). Dalam penulisan hukum ini, penulis yang bersangkutan mengangkat tema Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Perdagangan yang mengacu pada PBI Nomor 20/6/PBI/2018.[[20]](#footnote-20)

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk meneliti penerapan PBI Penyedia Jasa Pembayaran di PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk. tempat peneliti melaksanakan magang oleh karenanya peneliti mengangkat tema Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Penyedia Jasa Pembayaran yang merupakan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan merupakan bagian reformasi sistem pembayaran dari *Blue Print* Sistem Pembayaran 2025.

Berbeda dengan tiga penelitian di atas yang mana regulasi yang digunakan merupakan regulasi terdahulu, dan penelitian yang penulis buat lebih berfokus ke sistem pembayaran kartu debit.

## Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu menurut Moleong[[21]](#footnote-21) , Penelitian Lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif[[22]](#footnote-22). Ide Pentingnya peneliti berangkat ke lapangan langsung untuk mencari informasi sumber skripsi dengan terjun langsung ke objek yang diteliti setelah itu baru di analisis.

Setelah semua data dikumpulkan, kemudian penulis ambil kesimpulan dan langkah tersebut tidak harus urut tetapi berhubungan terus menerus sehingga membuat siklus[[23]](#footnote-23)

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.[[24]](#footnote-24)

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan normatif-empiris (*applied law research*) yaitu Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya adalah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. [[25]](#footnote-25)

1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data Primer dan Sekunder. karena sumber data diambil dari hasil wawancara dengan pegawai Bank BRI Kantor Pusat yaitu *assistant* manager divisi retail *payment*, dokumen peraturan perundang undangan, dalam penelitian ini sumber hukum yang digunakan adalah PBI Nomor 23/6/PBI/2021, serta bahan bahan keputusan lainnya, Lofland[[26]](#footnote-26), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.[[27]](#footnote-27) sedangkan sekunder ialah yang didapatkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang sudah ada.

* 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat *autoriatif*[[28]](#footnote-28), yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya terdiri dari:

* + 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
    3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
    4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 *Tentang Penyedia Jasa Pembayaran*.
    5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
  1. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan dari berbagai literasi atau bahan pustaka terkait masalah atau materi dari penelitian.[[29]](#footnote-29)

* 1. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan tambahan untuk membantu memahami bahan hukum sekunder dan tersier, diantaranya:

* + 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
    2. Kamus Hukum (*Black’s Law Dictionary*)
    3. Kamus Inggris-Indonesia
    4. Ensiklopedia Bebas
    5. Bibliografi

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang dapat mendukung dan berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu studi pustaka/dokumen. Menurut Louis R. Gottschalk, dokumen (dokumentasi) memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu berupa tulisan, lisan, gambaran, maupun arkeologis, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, juga yang didapatkan dari hasil pengumpulan data baik itu berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah, dan lain sebagainya[[30]](#footnote-30).

1. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terkumpul secara lengkap, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis data yang menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata ataupun pernyataan, bukan dengan angka-angka. Dalam proses analisis data, digunakan cara berpikir induktif, merupakan cara berpikir yang menyimpulkan hasil penelitian dari hal yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum[[31]](#footnote-31).

## Rencana Sistematika Penulisan

Dalam rangka memberikan gambaran maupun penjelasan secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baku, maka sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana pada setiap bab terbagi menjadi beberapa sub-bab yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada awal bab ini, penulis akan memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis yang didalamnya mencakup: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL, Bab ini akan menguraikan kerangka teoritis. Dalam kerangka teoritis, penulis akan mendeskripsikan kerangka teoritis yang menjadi dasar penulisan hukum ini, yaitu tinjauan umum tentang Bank, tinjauan umum tentang Bank Indonesia Sebagai Regulator Perbankan, tinjauan umum tentang Reformasi Sistem Pembayaran di Indonesia, juga tinjauan umum tentang Penyedia Jasa Pembayaran

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai penerapan peraturan Bank Indonesia Nomor. 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran di Bank BRI dan Kendala apa saja yang dihadapi Bank BRI dalam penerapan PBI No.23/6/PBI/2021.

BAB IV PENUTUP, dalam bab ini, penulis akan menjelaskan kesimpulan yang diambil berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Penulis juga akan memberikan saran- saran yang telah dipikirkan oleh penulis secara matang

DAFTAR PUSTAKA dalam bab ini, penulis akan mencantumkan daftar pustaka yang diambil berdasarkan sumber dan *footnote*.

1. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan [↑](#footnote-ref-1)
2. Bank Rakyat Indonesia. “*Profil Perusahaan*”. BRI corporate.website ebook reader. 27 Juni, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wawancara dengan Galih Andika, Assistant Manager Divisi Retail Payment, di Kantor BRI Jakarta Pusat, tanggal 22 November 2021 jam 09.00 – 11.30 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
4. Yuli Astuti,dkk, *Layanan Lembaga Keuangan Syariah SMK/MAK Kelas XI,* Jakarta : Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2021, hlm. 6 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara dengan Galih Andika, Assisstant Manager Divisi Retaail Payment, di Kantor BRI Jakarta Pusat, tanggal 22 November 2021 jam 09.00 – 11.30 WIB. [↑](#footnote-ref-5)
6. Peraturan Bank Indonesia No.18/42/PBI/2016 *Pembentukan Peraturan Di Bank Indonesia* [↑](#footnote-ref-6)
7. Agus Santoso dan Anton Purba, “Kedudukan Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Buletin Hukum Perbankan dan Perbanksentralan, Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2006)., hal. 12 [↑](#footnote-ref-7)
8. Peraturan Bank Indonesia No.18/42/PBI/2016 *Pembentukan Peraturan Di Bank Indonesia.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Agus Santoso dan Anton Purba, “Kedudukan Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Buletin Hukum Perbankan dan Perbanksentralan, Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2006)., hal. 12 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sri Mulyati Tri Subari, *et al., Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia,* Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pembukaan Peraturan Bank Indonesia No.23/6/PBI/2021. *Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.* 1 Juli 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147. Jakarta [↑](#footnote-ref-11)
12. Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 *Tentang Penyedia Jasa Pembayaran:* https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI\_230621.aspx di akses pada tanggal 26 November 2020 [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 2 point 1, Peraturan Bank Indonesia No.23/6/PBI/2021. Tentang Penyedia Jasa Pembayaran*.* 1 Juli 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147. Jakarta [↑](#footnote-ref-13)
14. Veithal Rivai, dkk*., Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, hlm 136. [↑](#footnote-ref-14)
15. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tertanggal 13 April 2009 Perihal Uang Elektronik, Jakarta: BI, 2009, hlm. 27. [↑](#footnote-ref-15)
16. Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia No.23/6/PBI/2021. Tentang Penyedia Jasa Pembayaran. 1 Juli 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 147. [↑](#footnote-ref-16)
17. Pasal 45 Point 3C, Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011. Tentang Pelaksanaan Fungai Kepatuhan Bank Umum*.* 12 Januari 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16. Jakarta [↑](#footnote-ref-17)
18. Muhammad Mustain. “Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (E-Money) di Indonesia”. ***Skripsi.*** Universitas Negeri Semarang, 2018. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tedy Dorisman Setiadi, “Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Kredit Pada Pusat Perbelanjaan Di Kota Bengkulu”. ***Masters thesis***, Universitas Bengkulu, 2018. [↑](#footnote-ref-19)
20. Triana Pratiwi. *“Aspek Hukum Penggunaan Uang Elektronik Dalam Transaksi Perdagangan (Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik).”* *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020. [↑](#footnote-ref-20)
21. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid* [↑](#footnote-ref-22)
23. Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif (dasar-dasar Praktis dan Teoritis*), Surakarta : Pusat Penelitian Surakarta, 2002, hlm 13

    [↑](#footnote-ref-23)
24. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: Universitas Indonesia, 2005, hlm. 43. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid* [↑](#footnote-ref-25)
26. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 157 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-27)
28. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2005, hlm 181.* [↑](#footnote-ref-28)
29. Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015 hlm. 156. [↑](#footnote-ref-29)
30. Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah,* Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 38 [↑](#footnote-ref-30)
31. A. Rijali, “Analisis data Kualitatif”, ***Jurnal Alhadharah****,* Volume 17, Nomor 33, November, 2021, hlm. 81-83. [↑](#footnote-ref-31)